

PERAN ASURANSI DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDS)

Oleh:

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Batari Laskarwati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendal-Batang

corresponding Author: ellectra_aa@yahoo.co.id

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> <i>Received 10 April - 2022</i> <i>Accepted 24 April - 2022</i> <i>Available Online</i> <i>30 April - 2022</i>	<i>The insurance industry can be a driver of sustainable development by collecting premiums, but insurance has a problem, namely the public's low understanding of insurance, so it is necessary to educate the public about the role of insurance. insurance, sustainable development research results confirm that the importance of disaster insurance is an alternative priority in disaster management activities in Indonesia. Finally, insurance through sharia insurance can also play a role by targeting those who are not touched by conventional insurance for reasons of belief. With the largest Muslim population in the world at 222 million people, the possibility of groups that do not want to accept conventional insurance is very large, and this is where Islamic insurance can play a role. With the contribution of all sectors including insurance, hopefully Indonesia can become one of the countries with the highest progress in terms of achieving the SGD targets.</i>
<i>Keyword :</i> <i>insurance industry,</i> <i>sustainable development</i>	

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi *Sustainable Development Goals (SGDs)* sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. *SGDs* didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Berdasarkan laporan "*The Sustainable Development Goals Report 2018*" yang disusun oleh Bank Dunia, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam 3 tahun implementasi *SGDs* seperti menurunnya angka kematian ibu dan bayi, penurunan angka pernikahan dini, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih banyak lagi capaian yang masih jauh dari target seperti di bidang sosial, sanitasi, dan lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa melihat kemajuan yang dicapai hingga saat ini, terdapat kekhawatiran bahwa banyak target-target *SGDs* yang tidak akan tercapai hingga batas waktu 2030.

Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan manufaktur dan perkembangan industri perbankan yang berjalan cukup pesat. Padahal industri asuransi dengan segala aspek dan bentuknya, sangat luas pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian pada umumnya. Industri asuransi berperan sebagai penghimpun sekaligus pengerah dana masyarakat melalui akumulasi premi yang diinvestasikan pada pelbagai aktivitas ekonomi guna menunjang pembangunan dan merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain itu industri asuransi juga merupakan objek bagi pemasukan keuangan negara. Asuransi berarti jaminan terhadap risiko. Terdapat dua sisi yang berbeda dalam mengartikan risiko. Sisi pertama, risiko dapat berarti kerugian dan sisi yang kedua berarti ketidakpastian. Pencurian, penggelapan dan keputusan pengadilan yang bersifat merugikan sehingga menyebabkan kerugian kekayaan merupakan bentuk langsung dari kerugian ekonomi. Kematian, cacat, pemecatan dan pengangguran merupakan bentuk-bentuk kerugian pendapatan.

2. PEMBAHASAN

Konsep risiko dalam pasar uang secara esensial sama dengan risiko *downside* (alokasi aset portofolio yang berkaitan dengan probabilitas penurunan harga aset). Hubungan ini disebut risiko *downside* dalam saham atau *bond*. Risiko dalam arti ketidakpastian adalah pertaruhan mengambil kesempatan meskipun nampaknya tidak ada peluang keuntungan dan harus mencari suatu kepuasan mengganti kerugian akibat peluang ekonomi negatif. Portofolio sendiri adalah kumpulan bentuk investasi terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama portofolio investasi adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun untuk pertumbuhan perusahaan. Perlu adanya suatu cara penanggulangan untuk memperkecil peluang adanya risiko ekonomi yang kemudian disebut sebagai sistem keamanan finansial. Sistem keamanan finansial adalah setiap sistem ekonomi yang dibentuk terutama untuk mentransfer risiko ekonomi secara individu ke kelompok atau dari satu kelompok individu ke kelompok lain. Sistem keamanan finansial dapat diklasifikasikan dalam bentuk meminimalkan kerugian ekonomi dan sebagai mekanisme transfer kerugian.

Perlu disadari bahwa untuk mencapai target-target *SGDs*, semua pihak dan semua sektor semestinya ikut berkontribusi. Tulisan ini akan secara khusus membahas bagaimana peran sektor asuransi dalam pencapaian target-target *SGDs* dan hal-hal apa yang dapat dimanfaatkan dari sana. Secara praktik, sebetulnya asuransi merupakan salah satu bisnis paling tua di dunia. Berdasarkan catatan sejarah, praktik asuransi sudah ada sejak 3000 SM, yaitu di China dimana para pedagang mengirimkan barangnya dengan cara membaginya dalam beberapa kapal, lalu apabila salah satu kapal tenggelam dalam perjalanan, kerugian akan ditanggung secara bersama oleh semua pedagang, bukan hanya oleh pedagang yang kehilangan barangnya saja. Sedangkan praktik semacam asuransi jiwa pertama kali muncul sekitar 2500 SM yaitu di Yunani dimana masyarakat mengumpulkan iuran yang akan dipakai untuk proses pemakaman apabila salah satu anggota masyarakat disana meninggal dunia. Dengan sejarah yang telah begitu lama, kita dapat sepakat bahwa asuransi sebenarnya

sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting keberadaanya bagi masyarakat, termasuk juga dapat berperan penting dalam pencapaian target-target *SGDs*. Terkait hal tersebut, menurut penulis, paling tidak terdapat empat peran yang dapat dimanfaatkan dari sektor asuransi dalam pencapaian *SGDs*, yaitu penanggulangan kemiskinan, mitigasi risiko bencana, penyediaan instrumen jaminan atas proyek-proyek *SGDs*, dan khusus asuransi syariah, menyediakan alternatif bagi mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional (inklusi asuransi). Asuransi dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan alternatif mitigasi atas risiko-risiko besar yang meskipun kemungkinan kejadiannya kecil, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya adalah asuransi jiwa bagi keluarga dimana hanya ayah yang bekerja (*single income*) atau asuransi kebakaran pabrik bagi pengusaha yang mengandalkan penghasilannya hanya dari pabrik tersebut. Kedua risiko tersebut adalah contoh risiko yang peluang terjadinya sangat kecil tetapi dampaknya sangat besar, bahkan dapat mengubah orang atau keluarga dari golongan mampu menjadi golongan miskin.

Secara teori sebetulnya mitigasi risiko bukan hanya dapat dilakukan melalui asuransi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan simpanan, baik dalam bentuk tabungan di bank maupun dalam bentuk aset-aset lain yang likuid, dalam jumlah yang sangat besar untuk melindungi dari risiko besar yang dapat terjadi (*risk retention*). Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memupuk simpanan dalam jumlah yang sangat besar, apalagi pada saat mereka masih di masa-masa awal seperti pasangan muda atau pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Selain itu, asuransi juga memiliki kelebihan dalam bentuk insentif untuk lebih sadar risiko. Hal ini karena perusahaan asuransi biasanya membebankan premi yang lebih rendah kepada mereka yang mau berusaha menurunkan risiko, misalnya kepala keluarga yang tidak merokok untuk kasus asuransi jiwa atau pabrik yang memiliki fasilitas pemadam kebakaran untuk kasus asuransi kebakaran. Selain mitigasi atas risiko-risiko yang dihadapi oleh individu (*particular risk*) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, asuransi juga dapat menjadi alat untuk mitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh sejumlah besar orang, atau biasa disebut dengan *fundamental risk*. Salah satunya adalah risiko bencana alam seperti gempa bumi,

banjir, atau gunung meletus yang berdampak pada puluhan sampai ribuan orang sekaligus. Saat ini pemerintah juga telah memiliki perhatian terhadap pembentukan program asuransi bencana, misalnya dengan telah dilaksanakannya asuransi bencana untuk Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2016. Mekanisme asuransi bencana yang lain juga sedang terus dikaji kemungkinan pelaksanaannya.

Asuransi juga dapat mendukung pencapaian *SGDs* dalam bentuk penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek *SGDs* seperti pembangunan sarana transportasi, listrik, sanitasi dan yang lainnya. Jaminan yang dimaksud adalah dalam bentuk ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal untuk diselesaikan. Saat ini mekanisme penjaminan tersebut juga telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dengan adanya mekanisme penjaminan, diharapkan dapat lebih mendorong peran investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek *SGDs*.

3. KESIMPULAN

Persoalan asuransi bencana memang harus ditangani oleh negara, mengingat dana untuk pembiayaan dalam penanggulangan bencana memang sangat besar dan tidak akan mungkin dibebankan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dalam hal ini maka, alternatif penggunaan asuransi bencana akan dapat menekan jumlah dana yang harus disiapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, misalnya biaya penanggulangan bencana yang harus disediakan setiap tahun nilainya sekitar Rp 30 triliun, dengan asumsi biaya premi asuransi bencana sekitar 1% maka anggaran yang harus disediakan hanya sebesar Rp 300 miliar, yang dapat dialokasikan oleh negara untuk membayar premi asuransi bencana bagi orang yang meninggal dunia dan atau untuk rumah. Kasus tsunami Aceh sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah menghabiskan dana Rp 42.7 triliun, yang semuanya menjadi tanggungan negara, meski masih ada juga bantuan dari negara lain, tetapi jumlahnya tidak lebih dari Rp 10 triliun, dan selebihnya ditanggung oleh APBN secara bertahap, yang sampai dengan saat ini belum selesai secara menyeluruh. Padahal jika menggunakan asuransi bencana dengan asumsi biaya premi antara 1% sampai 3%, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp 427 Milyar sampai Rp1.281 Milyar. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya asuransi bencana menjadi prioritas

alternatif di dalam kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Terakhir, asuransi melalui asuransi syariah juga dapat berperan dengan menasar mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional karena alasan keyakinan. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sejumlah 222 juta orang, kemungkinan kelompok yang tidak mau menerima asuransi konvensional jumlahnya sangat banyak, dan disinilah asuransi syariah dapat berperan. Dengan kontribusi semua sektor termasuk perasuransian, semoga Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan progres paling tinggi dalam hal pencapaian target-target *SGDs*.

4. REFERENSI

- Affandi, N.A dan Anwar, N. (2006). *Pemodelan Hujan-Debit menggunakan Model HEC-HMS di DAS Sampean Baru* (Paper). Magister Manajemen dan Rekayasa Sumber Ari Jurusan Teknik Sipil ITS, Surabaya.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. (2010). Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Comptroller of the Currency Administrator of National Banks. (2009). *Flood disaster protection handbook*. Consumer Compliance Examination. Diakses melalui <https://www.occ.gov/>
- Dewan Asuransi Indonesia. (2013). *Challenges and prospects in developing microinsurance in Indonesia. The 9th International Microinsurance Conference 2013*, Jakarta.
- Ezkirianto, R & Findi A. M. (2013). Analisis keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2 (1), 14-29.
- Fiedler. (1999). Diakses melalui Routing pada 9 September 2006.
- Hendri, A & Inra, M.S. (2007). *Pemodelan penelusuran banjir dengan Metode Muskinghum*.
- Olivia. G., & Argo, T.A. (2015). Kesiapan menghadapi bencana banjir melalui pendekatan skema asuransi yang mempertimbangkan ketataruangan di DKI Jakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4 (5), 313-327.
- United Nations. (2018). *The Sustainable Development Goals Report 2018*. New York, USA.

- McKinsey Center for Business and Environment.
(2016). *Financing change: How to mobilize private-sector financing for sustainable infrastructure*. New York, USA.
- Vaughan, E.J. & Vaughan, T. (2008). *Fundamental of Risk and Insurance*. New Jersey: John Willey and Sons, Inc.